



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1. Profil dan Fungsi Dinas tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Riau

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. pembinaan dan fasilitasi bidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. pelaksanaan tugas di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan kerja dan produktivitas, pengawasan ketenagakerjaan, hubungan industrial dan jaminan sosial, serta ketransmigrasian, kependudukan dan catatan sipil;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil;
6. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2. Visi, Misi, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Riau

4.2.1 Visi

Terwujudnya Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang Profesional, Produktif, Mandiri, sejahtera dan Berdaya Saing Tinggi serta Administrasi Kependudukan yang Tertib

4.2.2. Misi

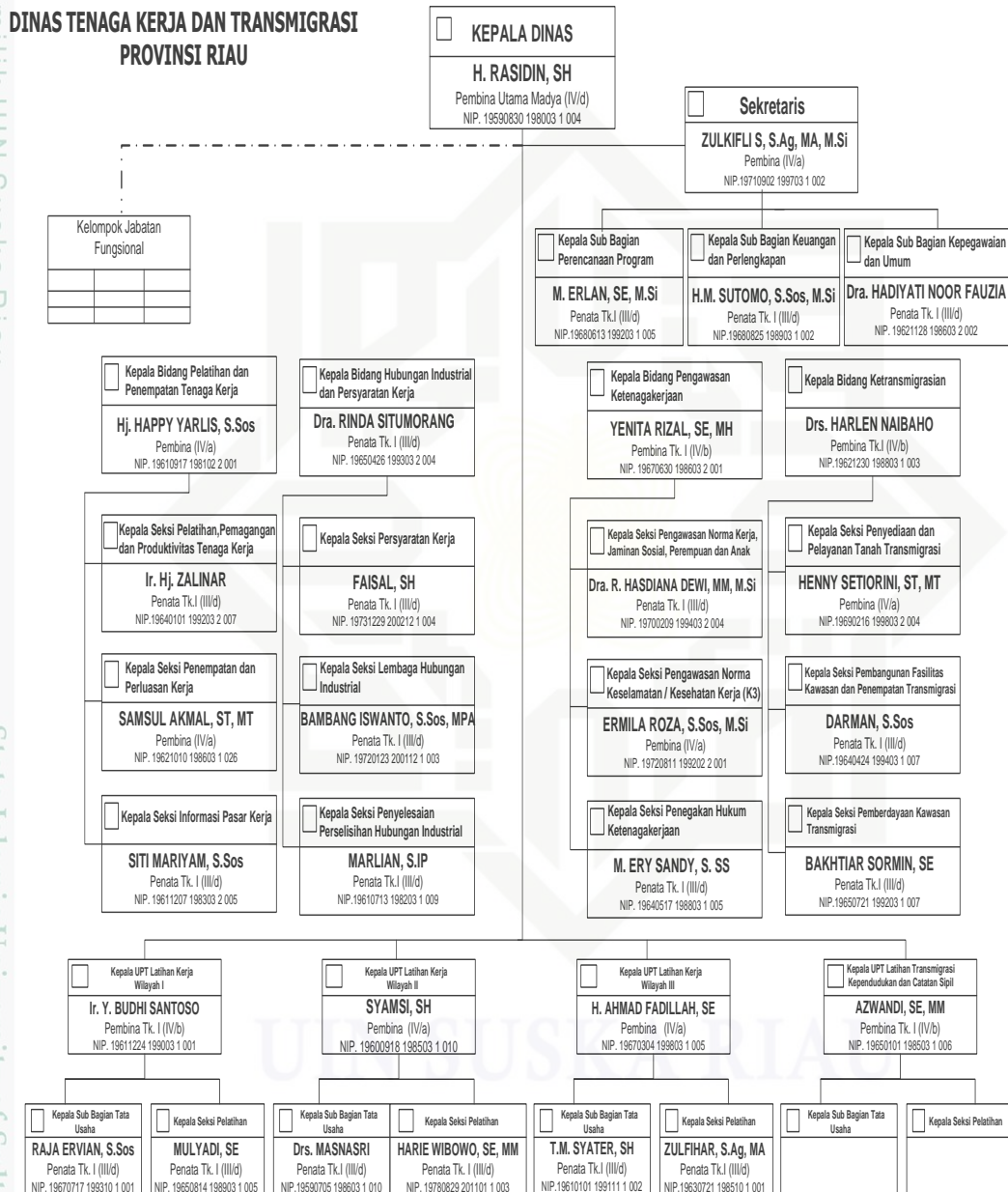
1. Mewujudkan sumberdaya insani Riau yang brdaya saing tinggi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan melalui perluasan lapangan kerja, penempatan tenaga kerja dan peningkatan kesempatan kerja.
3. Mewujudkan kompetensi dan produktivitas tenaga
4. Mewujudkan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja dalam segala aspek
5. Mewujudkan terlaksananya hubungan industrial yang dinamis dan dialog
6. Mewujudkan peningkatan jaringan kemitraan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian berbagai masalah tenaga kerja
7. Mewujudkan pengawasan norma ketenagakerjaan, kesehatan, keselamatan kerja dalam upaya penegakan hukum menuju terciptanya iklim investasi yang kondusif
8. Mewujudkan kualitas SDM transmigran, penyebaran perpindahan penduduk dan mengembangkan masyarakat transparansi serta masyarakat di sekitar kawasan transmigrasi serta berkelanjutan menuju desa maju, mandiri dan produktif
9. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan menuju tertip administrasi kependudukan.

4.3. Struktur Organisasi Dinas tenaga Kerja, Transmigrasi, dan kependudukan Provinsi Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Riau

4.4.1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan Secretariat, Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial, dan Persyaratan Kerja, Bidang Pengawasan Ketenaga Kerjaan, Bidang Pengembangan Pemukiman, dan Penempatan Transmigrasi, Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat kawasan Transmigrasi dan Bidang Kependudukan serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan pemerintah kepada gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.4.2. Sekretaris

Secretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan perlengkapan Subbagian Umum. Dalam hal ini secretariat diantun oleh ;

1. Kepala Sub Bagian Perincian Program
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

4.4.3. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

Bidang pengawasan dan ketenaga kerjaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Seksi Pengawasan Norma Ketenaga Kerjaan, Seksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan Keselamatan/Kesehatan Kerja dan Seksi Penegakan Hukum Ketenaga Kerjaan. Dalam hal ini bidang Pengawasan Ketenaga Kerjaan di bantu oleh;

1. Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak
2. Kepala Seksi Pengawasan Norma Keselamatan / Kesehatan Kerja (k3)
3. Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan.

4.4.4. Kepala Bidang Ketrasmigrasian

Bidang ketrasmigrasian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Seksi Penyediaan dan Sertifikasi tanah Transmigrasi, Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana Transmigrasi dan Seksi Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi. Dalam hal ini bidang ketrasmigrasian di bantu oleh;

1. Kepala Seksi Penyediaan dan Pelayanan Tanah Transmigrasi.
2. Kepala Seksi Pembangunan Fasilitas Kawasan dan Penempatan Transmigrasi.
3. Kepala Seksi Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi.

4.4.5. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Bidang penempatan tenaga kerja mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pada Seksi pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, seksi penempatan dan pengangguran Tenaga Kerja dan Seksi Informasi dan Peluasan Kerja. Dalam hal ini bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dibantu Oleh;

1. Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepala Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja.

4.4.6. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Persyaratan Kerja

Bidang Hubungan Industrial dan persyaratan kerja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada seksi Persyaratan Kerja, Seksi Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial dan Seksi Lembaga Hubungan Industrial dalam hal ini bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja dibantu oleh;

1. Kepala Seksi Persyaratan Kerja
2. Kepala Seksi Lembaga Hubungan Industrial
3. Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.